

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Pembangunan ekonomi di Indonesia pada awalnya dapat berjalan dengan baik, terlebih lagi dengan adanya program pembangunan ekonomi dari pemerintah secara bertahap dan berkesinambungan yang telah disusun pada masa pembangunan jangka panjang pertama selama 25 (duapuluh lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan ekonomi makro dan mikro yang meningkat pesat seiring dengan pertumbuhan unit-unit usaha kecil atau besar di dalam dunia perdagangan dan ekonomi Indonesia. Fenomena ini mengakibatkan tingginya mobilitas sumber daya manusia dan sumber daya usaha, sehingga terjadi perputaran modal dan kekayaan yang membesar dari waktu ke waktu di dalam dunia perekonomian.

Krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada bulan Juli 1997 yang membawa dampak sangat besar terhadap sendi-sendi kehidupan ekonomi Indonesia, terutama terhadap dunia usaha dan diperparah lagi oleh krisis politik yang mengakibatkan lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia saat itu pada tanggal 21 Mei 1998.<sup>1</sup>

Krisis moneter itu diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar AS. Hal tersebut telah mengakibatkan utang para pengusaha Indonesia dalam valuta asing, terutama terhadap kreditor luar negeri menjadi membengkak luar biasa sehingga mengakibatkan

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 29

banyak debitor tidak mampu membayar utang-utangnya. Di samping itu kredit macet di perbankan dalam negeri juga makin membumbung tinggi secara luar biasa (sebelum krisis moneter perbankan Indonesia memang juga telah menghadapi masalah kredit bermasalah atau *Nonperforming Loans* yang memprihatinkan), yaitu sebagai akibat terpuruknya sektor riil karena krisis moneter tersebut. Kondisi ini mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang pada akhirnya dinyatakan pailit.

Kepailitan selalu menimbulkan akibat panjang baik bagi kreditor maupun *stake holder* perusahaan terutama karyawan perusahaan karena bagaimanapun terjadi pemutusan hubungan kerja akan membawa implikasi yang kurang baik terhadap perusahaan. Secara lebih luas kepailitan perusahaan akan membawa pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian negara, sementara itu saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang senantiasa menghadapi ancaman permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga karena kesulitan membayar utang perusahaan terhadap kreditor-kreditornya.

Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 ayat 1 adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal ini kepailitan berfungsi sebagai *emergency window*, yaitu pintu keluar darurat, dimana kepailitan merupakan jalan keluar untuk proses pendistribusian harta kekayaan debitor yang nantinya merupakan boedel pailit secara pasti dan adil.

Tujuan dari pengaturan tentang kepailitan pada hakekatnya adalah :

- Pertama;* untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor,
- Kedua;* untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lainnya,
- Ketiga;* untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan salah seorang kreditor atau debitor sendiri.<sup>2</sup>

Syarat kepailitan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama untuk menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara proposional (*prorate parte*) dan

---

<sup>2</sup> Etty S. Suhardo, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 11-12

sesuai dengan struktur kreditor.<sup>3</sup>

Pada Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan, putusan kepailitan berakibat hilangnya segala hak debitor untuk mengurus segala harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta pailit (*boedel pailit*). Perlu diketahui bahwasanya putusan pernyataan pailit tidak mengakibatkan debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja.<sup>4</sup> Kewenangan debitor itu selanjutnya diambil alih oleh kurator. Ketentuan tersebut berlaku sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit. Kepailitan ini meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sesudah pernyataan pailit tersebut maka segala perikatan yang dibuat debitor dengan pihak ketiga tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit atau dapat menambah harta pailit. Oleh karena itu gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan, yang secara langsung diajukan kepada debitor pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan atau rapat verifikasi.

Penyelesaian utang-piutang terhadap kreditor pemegang hak jaminan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 55 menyebutkan bahwa setiap kreditor pemegang Gadai, Jaminan Fidusia, Hak

---

<sup>3</sup> M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma & Praktik di Peradilan*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 1

<sup>4</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm 256

Tanggungan, Hipotik atau Hak Agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Ketentuan pasal tersebut sejalan dengan diakuinya hak separatis dari pemegang jaminan sebagaimana ditentukan oleh KUHPerdara.

Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Penangguhan selama 90 (sembilan puluh) hari setelah debitor dinyatakan pailit dan apabila jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut telah lewat maka hak eksekusi kreditor pemegang hak jaminan dihidupkan kembali untuk jangka waktu 2 (dua) bulan sejak dimulainya keadaan insolvensi. Lewatnya jangka waktu dihidupkannya kembali hak kreditor untuk mengeksekusi agunan menyebabkan kurator dapat menuntut diserahkan barang yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual di depan umum dengan izin Hakim Pengawas, tanpa mengurangi hak pemegang hak tersebut untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut. Ketentuan pasal ini menjadi tidak sejalan dengan hak separatis dari pemegang hak jaminan yang diakui oleh Pasal 56 ayat (1) UUK dan PKPU serta telah memasung hak separatis dari kreditor pemegang hak jaminan yang seharusnya benda-benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut tidak termasuk dan berada diluar harta pailit.

Menurut peraturan kepailitan yang lama, yaitu *Faillissementverordening* bahwa kreditor preferen dapat melaksanakan haknya sekalipun tidak ada

kepailitan. Artinya ketentuan mengenai penangguhan selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) UUK dan PKPU tidak ada, dengan kata lain, menurut peraturan kepailitan yang lama itu adalah hak separatis dari kreditor preferen. Setiap kreditor mempunyai kedudukan yang sama. Pengecualian hak kreditor dengan alasan-alasan yang sah, antara lain hak-hak khusus yang diatur oleh undang-undang. Hak untuk didahulukan diantara para kreditor yaitu kreditor preferen dan kreditor separatis timbul karena Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek. Syarat preferensi adalah tagihan yang berupa Hak Istimewa; tagihan yang dijamin dengan Hak Gadai; jaminan yang dijamin dengan Hipotek; Hak Tanggungan (UU NO. 4 Tahun 1996); Hak Jaminan Fidusia (UU No.42 Tahun 1999). Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan piutangnya, kecuali ditentukan oleh hak istimewa harus diatur dengan tegas.

Hak eksekusi kreditor pemegang hak jaminan ditangguhkan untuk jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Namun penangguhan terhadap hak eksekusi kreditor pemegang hak jaminan tersebut berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dari uraian-uraian pasal-pasal tersebut maka timbul norma yang inkonsisten terhadap ketentuan hukum dalam hukum jaminan maupun antara pasal-pasal dalam hukum kepailitan sendiri yang mengakibatkan kerancuan dalam penerapan aturan

tentang kedudukan dan kewenangan kreditor separatis.

Studi kasus sebagai contoh dapat dilihat pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Nomor : 02/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 25 Maret 2009, yang menetapkan PT.Dawamiba Engineering baik atas nama perusahaan maupun atas nama para pemegang saham dan pengurus perusahaan yang dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Maka tim kurator segera melakukan pencatatan terhadap seluruh asset-asset debitor pailit berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan serta pernyataan dari para pengurus dan pemegang saham PT Dawamiba Engineering (dalam pailit) yang kemudian telah dilaporkan kepada Hakim Pengawas dan telah dibacakan dalam rapat kreditor, kemudian setelah rapat pencocokkan tagihan (rapat verifikasi) dilakukan oleh tim kurator di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, juga telah ditentukan oleh Hakim Pengawas, bahwa debitor pailit dalam keadaan insolvensi, karena sampai dengan batas waktu yang diperbolehkan oleh Undang Undang, debitor pailit tidak juga mengajukan rencana perdamaian kepada para Kreditor.

Sejak dinyatakannya debitor pailit dalam keadaan insolvensi oleh Hakim Pengawas, maka berjalanlah waktu yang diperbolehkan oleh Undang Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bagi Kreditor (dalam kasus ini PT. Bank Mandiri) sebagai Pemegang Jaminan (separatis) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri mengenai harta benda yang berada ditangan kreditor dengan cara dilelang pada saat masa insolvensi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan yaitu terhitung mulai tanggal 11 Juni 2009 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2009.

Karena batas waktu yang ditentukan undang-undang sangat sempit maka kreditor separatis belum bisa mengeksekusi jaminan tersebut sehingga Kreditor separatis sudah tidak memiliki hak lagi untuk melakukan lelang dan harus menyerahkan harta-harta milik debitor pailit kepada tim kurator PT Dawamiba Engineering (dalam pailit) untuk dijual guna pemberesan dan pembagian kepada seluruh kreditor dengan tidak menghilangkan hak PT. Bank Mandiri sebagai kreditor pemegang jaminan kebendaan (separatis);

Berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 02/PAILIT/2009/PN.NIAGAJKT.PST., tanggal 9 Februari 2010 telah secara tegas menyatakan seluruh asset – asset baik yang atas nama PT Dawamiba Engineering (dalam pailit maupun atas nama para pemegang saham dan pengurus PT Dawamiba Engineering (dalam pailit) yang berada pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan boedel pailit PT Dawamiba Engineering (dalam pailit) , sehingga memberikan ijin kepada Tim Kurator untuk menerima dokumen- dokumen asli kepemilikan atas asset - asset boedel pailit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ;

Berdasarkan penetapan tersebut Tim Kurator telah mengirimkan surat kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan surat Nomor 040/Pailit/DE/TK/II/2010, tanggal 25 Februari 2010 dan surat Nomor 042/Pailit/DE/TK/2010 , tanggal 17 Maret 2010 yang pada pokoknya meminta kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk untuk menyerahkan asset - asset PT Dawamiba Engineering (dalam pailit) yang merupakan boedel pailit PT Dawamiba Engineering (dalam pailit), yaitu berupa :

- a. Tanah dan bangunan kantor yang terletak di Jalan Dewi Sartika No. 293



AX, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati , Jakarta Timur , dengan bukti kepemilikan SHM No. 00005/Cawang atas nama Ir.Fransiscus Noer Daya Prih Suhardi;

- b. Tanah dan bangunan kantor yang terletak di Jalan Dewi Sartika No. 262 Cawang, sertifikat hak milik No. 405 atas nama Ir. Fransiscus Noer Daya Prih Suhardi;
- c. Tanah kosong terletak di Jalan Jababeka Raya Kav.E1- 5 No. 161, sertifikat hak guna bangunan Nomor 38, atas nama Sri Hono Hadiwirjatna;
- d. Tanah dan bangunan yang terletak di Gajah Mungkur Semarang dengan sertifikat hak milik Nomor 170, atas nama Sri Hono Hadiwirjatna;
- e. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan SMA 14 No.1, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur dengan 2 (dua) sertifikat hak milik masing- masing 638/Cililitan atas nama Ir.Fransiscus Noer Daya Prih Sahardi dan SHM Nomor : 639/Cililitan atas nama Ir.Fransiscus Daya Prih Sahardi;

Berdasarkan surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Nomor TFS.Sm/318/2010, tanggal 31 Mei 2010, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, tidak memberikan kepada tim kurator dengan alasan, bahwa harta tersebut bukan merupakan boedel pailit PT Dawamiba Engineering (dalam pailit) karena sertifikat-sertifikat tersebut terdaftar atas nama pengurus dan pemegang saham PT Dawamiba Engineering (dalam pailit) bukan atas nama PT Dawamiba Engineering (dalam pailit), namun disebutkan bahwa PT Bank Mandiri (Persero), Tbk akan memberikan asset-asset tersebut kepada tim

kurator setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa asset-asset tersebut di atas merupakan boedel pailit PT Dawamiba Engineering (dalam pailit) dan menghukum PT Bank Mandiri (Persero ) Tbk untuk menyerahkan asset - asset tersebut kepada tim kurator.

Pada akhirnya putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 20 April 2011 menetapkan bahwa PT. Bank Mandiri merupakan kreditor pemegang jaminan kebendaan (separatis) yang memegang jaminan kebendaan milik debitor pailit yang menjadi budel pailit harus diserahkan kepada tim kurator, yang sebelumnya ditetapkan pada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 02/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 1 September 2010.

Akibat tidak konsistennya pasal-pasal dalam Undang-undang Kepailitan khususnya yang mengatur tentang hak kreditor separatis menimbulkan ketidakseimbangan kepentingan kreditor separatis sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Hak Tanggungan dan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia serta diatur pula dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, terlebih lagi jika dibaca dan dipahami ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul : “Kedudukan Bank Sebagai Kreditor Separatis Pada Kepailitan”.

---

<sup>5</sup> Ivada Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis dalam mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, (Yogyakarta : LaksBang Pressindo, 2011), hlm. 6

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan bank sebagai kreditor separatis pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Nomor : 02/PAILIT/2009/PN.NIAGA. JKT.PST, tanggal 25 Maret 2009 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 20 April 2011.
2. Bagaimana akibat hukum bagi kreditor separatis dalam hal ditetapkannya putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Nomor : 02/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 25 Maret 2009 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 20 April 2011.

## C. Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan penulisan hukum ini tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mencari pemahaman tentang masalah-masalah yang telah dirumuskan. Maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan bank sebagai kreditor separatis pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Nomor : 02/PAILIT/2009/PN.NIAGA. JKT.PST, tanggal 25 Maret 2009 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 20 April 2011.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum bagi kreditor separatis dalam hal ditetapkannya putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,

Nomor : 02/PAILIT/2009/PN.NIAGA. JKT.PST, tanggal 25 Maret 2009 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 20 April 2011.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

Bagi para teoritis, penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan mengenai kreditor dalam kepailitan khususnya terhadap kreditor separatis yang telah diatur dalam UU Kepailitan dan mengenal hak tanggungan serta bagaimana penerapannya apabila berhadapan dengan kepailitan seorang debitor. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan sehingga lebih memperjelas kedudukan kreditor separatis, apa akibat kepailitan terhadap objek hak tanggungan dan bagaimana pelaksanaan hak eksekusinya terhadap hak jaminan yang ada padanya apabila debitor dinyatakan pailit.

##### 2. Manfaat Praktis

Bagi para praktisi hukum, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman menyelesaikan tugas dalam praktik kepailitan di Pengadilan Niaga agar tidak menyimpang dari sistem hukum di Indonesia dan dapat diterapkan dalam kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat serta demi terciptanya kepastian hukum.

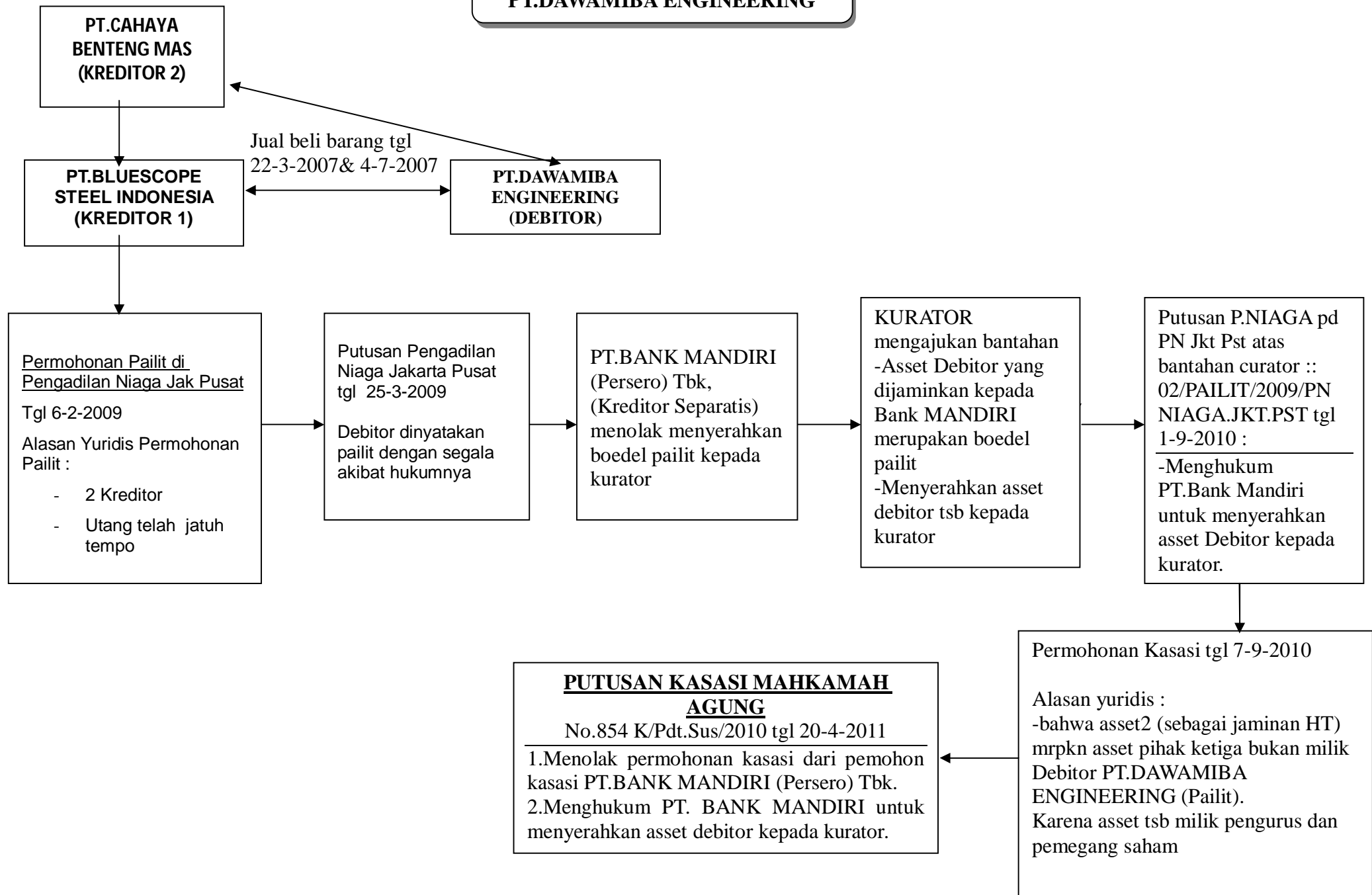
## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka konseptual

Untuk lebih jelas nya alur pikir penulis di dalam penulisan penelitian tesis ini, maka penulis menyusun skema kerangka pemikiran, sebagai dasar pemikiran dan pengembangan sekaligus pembatasan alur pemikiran sehingga tidak menyimpang dari apa yang menjadi maksud dan tujuan tesis ini. Adapun kerangka pemikiran penulis dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :

**SKEMA KEPAILITAN  
PT.DAWAMIBA ENGINEERING**

14



Kerangka pemikiran penulis sebagaimana dituangkan di dalam skema tersebut di atas menggambarkan bahwa, PT Dawamiba Engineering telah dimohonkan pailit oleh salah seorang kreditornya yaitu PT. Bluescope Steel Indonesia, dengan alasan yuridis, yaitu ada 2 (dua) kreditor (kreditor lainnya adalah PT. Cahaya Benteng Mas), dan hutangnya telah jatuh tempo.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memeriksa permohonan pailit tersebut, melalui putusannya menyatakan PT. Dawamiba Engineering pailit dengan segala akibat hukumnya. Putusan pailit tersebut membawa akibat, bahwa PT. Dawamiba Engineering (debitor pailit) demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai kekayaan yang termasuk harta pailit (boedel pailit). Setelah dinyatakan pailit, harta pailit diurus dan dikuasai oleh kurator (untuk kepentingan semua kreditor dan debitor), dan didalam pelaksanaan jalannya kepailitan diawasi oleh hakim pengawas.

Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Kepailitan, Kurator menjalankan tugasnya untuk mengurus dan membereskan harta pailit.

Kurator memulai tugasnya dengan melakukan inventarisasi baik kekayaan-kekayaan debitor yang masuk dalam boedel pailit, sekaligus juga melakukan inventarisasi dan verifikasi hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban debitor pailit.

Pada saat melakukan inventarisasi kekayaan debitor pailit, Kurator menemukan adanya kekayaan PT. Dawamiba Engineering yang

dijaminkan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., dimana kekayaan-kekayaan debitor pailit tersebut telah dibebani Hak Tanggungan.

Kurator meminta kepada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk untuk menyerahkan kekayaan-kekayaan PT. Dawamiba Engineering (dalam pailit), atas dasar penetapan Hakim pengawas yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan baik yang atas nama PT. Dawamiba Engineering (dalam pailit) maupun atas nama pemegang saham dan pengurus PT. Dawamiba Engineering (dalam pailit) yang berada pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan boedel pailit PT. Dawamiba Engineering (dalam pailit) sehingga memberikan ijin kepada Kurator untuk menerima dokumen-dokumen asli kepemilikan atas kekayaan-kekayaan boedel pailit dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Kurator berupaya untuk menarik kekayaan-kekayaan PT Dawamiba Engineering (dalam pailit) ke dalam boedel pailit, namun PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tetap menolak menyerahkannya kepada Kurator, dengan alasan karena sertifikat-sertipikat tersebut merupakan nama pengurus dan pemegang saham PT. Dawamiba Engineering bukan atas nama PT. Dawamiba Engineering (dalam pailit). Atas penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk menyerahkan kekayaan-kekayaan PT. Dawamiba Engineering (dalam pailit) kepada Kurator tersebut, kemudian Kurator mengajukan bantahan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Majelis Hakim



Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan Kurator dan menghukum PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk menyerahkan kekayaan-kekayaan PT. Dawamiba Engineering (dalam pailit) kepada Kurator. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan saat ini telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap.

## 2. Kerangka Teoritik

Dalam hubungan hukum antara debitor dengan kreditor akan selalu ada kemungkinan bahwa debitor lalai, tidak mampu, atau tidak mau mengembalikan pinjamannya setelah jangka waktu pinjaman itu berakhir. Untuk melindungi kepentingan kreditor, hukum memberlakukan beberapa asas.

Ada dua asas pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132. Dalam Pasal 1131 disebutkan bahwa :

Segala barang bergerak dan tidak bergerak milik debitor , baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu.

Pasal 1132 menyebutkan bahwa :

Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Asas yang terkandung dalam kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apabila si Debitor tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayar sesuai kesepakatan walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi hutangnya atau karena tidak mampu membayar seluruh hutangnya. Maka semua harta bendanya disita untuk dijual, dan hasilnya dibagi-bagikan antara semua kreditor secacara pons-pons gewijse, artinya menurut peimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutangmasing-masing kreditor, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada alasan yang sah untuk didahulukan.
2. Semua kreditor mempunyai hak yang sama
3. Tidak ada nomor urut dari kreditor didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.

Disamping asas-asas umum yang terkandung di dalam KUH Perdata tersebut, masih ada asas-asas lainnya yang bersifat khusus. Asas-asas yang khusus tersebut adalah :

#### 1) Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan , yaitu dari satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, dilain pihak

terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

## 2) Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

## 3) Asas Keadilan

Dalam kepailitan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Azas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.

## 4) Asas Integritas

Asas integritas dalam UUK dan PKPU mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.<sup>6</sup>

Penulis dalam hal ini meneliti pada pelaksanaan putusan pernyataan palit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

1. PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT nomor : 02/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 25 Maret 2009;
2. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA nomor 854 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 20 April 2011.

---

<sup>6</sup>Etty S. Suhardo, *Opcit*, hlm. 12-13

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>7</sup>

Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan masalah, selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam bab I Pendahuluan, sehingga diperlukan rencana yang sistematis, metodologi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>8</sup>

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Oleh karena itu maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau

---

<sup>7</sup> Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1

<sup>8</sup> Soemitro Ronny Hanintijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 9

segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>9</sup>

Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Supaya mendapat hasil yang lebih maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini merupakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum.<sup>10</sup>

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan deskripsi serta data yang seteliti mungkin mengenai perkara permohonan pailit yang diajukan debitor dalam proses kepailitan. Analisa juga dilakukan dengan menggunakan cara kualitatif dari teori hukum atau doktrin-doktrin hukum terhadap perkara permohonan pailit yang diajukan debitor dalam proses kepailitan.

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI, 1986), hlm. 43

<sup>10</sup>Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Op.cit.* hlm. 14

### 3. Subyek dan Obyek Penelitian

#### a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah debitor (PT. Dawamiba Engineering) dan kreditor (PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk) serta Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus perkara pailit, sampai pada tingkat kasasi Mahkamah Agung.

#### b. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 02/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 25 Maret 2009, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 20 April 2011.

### 4. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau literatur, data sekunder tersebut meliputi :<sup>11</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang antara lain dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*);
- 3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm.93

- 4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah;
- 5) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 6) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 02/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 25 Maret 2009;
- 7) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 854 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 20 April 2011;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana terdapat dalam kumpulan pustaka yang menunjang bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Buku-buku;
- 2) Jurnal-jurnal;
- 3) Majalah-majalah;
- 4) Artikel-artikel; dan berbagai tulisan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa ; Kamus Hukum.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan,

## 6. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.

Pada metode ini data-data yang diperoleh yaitu data sekunder, akan diinventarisasi dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat deskriptif analisis. Setelah dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data maka langkah berikutnya ialah menganalisa data-data tersebut, selanjutnya disusun secara sistematis.





## H. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan hukum ini terdiri dari empat bab. Masing-masing perinciannya sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan, di dalamnya berisi uraian latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan diakhiri dengan uraian metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini.

Bab II Tinjauan Pusaka, Bab ini berisi konsep dan teori yang berkaitan dengan masalah pokok yang diteliti. Di sini penulis menguraikan tinjauan tentang kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam Bab ini berisi uraian hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan mengenai pertimbangan hukum Putusan Pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap PT. DAWAMIBA ENGINEERING yang telah memenuhi syarat kepailitan dan alasan serta pertimbangan hukum Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemohon kasasi.

Bab IV Penutup, pada bab IV ini berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.

Halaman Daftar Pustaka berisi daftar judul buku-buku yang digunakan sebagai referensi dan pedoman oleh penulis dalam penyusunan tesis ini. Buku-buku tersebut berkaitan dengan kedudukan bank sebagai kreditor separatis pada kepailitan. Halaman Lampiran berisi tentang lampiran-lampiran antara

lain: surat putusan Pengadilan Niaga Nomor  
02/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 25 Maret 2009 dan surat putusan  
Mahkamah Agung nomor : 854 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 20 April 2011.